

# ***Pendidikan Pamong Praja Generasi Baru Penelitian Tentang Kebijakan Pendidikan Tinggi Kedinasan (IIP + STPDN = IPDN) Depdagri Republik Indonesia***

□ **Lexie M. Giroth**  
(Institut Pemerintahan Dalam Negeri)

## **Abstrak**

*Penelitian ini dilandasi oleh suatu asumsi bahwa yang pasti di dunia ini hanyalah satu, yaitu perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah proses mengubah pengetahuan menjadi tindakan melalui formulasi substansi, implementasi kompetensi dan evaluasi performansi. Jadi dalam hal ini apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan sebagai sistem pengambilan kebijakan publik dalam rangka menemukenali dinamika terselubung dari suatu sistem yang kompleks agar dengan demikian Pamong Praja Indonesia Generasi Baru tidak terjebak pada kekacauan, perbenturan peradaban, paradoks dan titik balik peradaban serta arus balik kekuasaan dari pusat ke daerah.*

*Adapun temuan-temuan penelitian ini ialah bahwa terdapat dampak positif kebijakan publik terhadap gerak kinerja Pamong Praja Alumni PTK IIP + STPDN = IPDN Depdagri. Semakin besar dampak kebijakan publik semakin meningkat kinerja dan semakin meningkat lagi karena dukungan pemerintahan ideal. Tetapi dengan pemberdayaan rakyat terhadap gerak kinerja ternyata belum mempunyai korelasi yang signifikan. Dalam penelitian ini dirumuskan bahwa kebijakan publik adalah sistem, sains dan studi tentang proses perubahan pengetahuan menjadi tindakan melalui formulasi substansi, implementasi dan evaluasi performansi. Jadi apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.*

*Kata Kunci : Pamong Praja, Kebijakan Publik, Pendidikan, Kinerja, Pemberdayaan Rakyat, dan Good Governance.*

Penelitian ini sesungguhnya dirangkum dari hasil penelitian disertasi yang berjudul “Dampak Kebijakan Publik Terhadap Kinerja Pamong Praja Alumni Pendidikan Tinggi Kedinasan: Studi Kasus pada Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor Bandung Perguruan Tinggi Kedinasan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia,” yang telah dipertahankan oleh peneliti pada ujian promosi Doktor dihadapan Senat Guru Besar bertempat di Gedung Partere Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung tanggal 21 April 2003.

Adapun tema sentral masalah mengapa penelitian ini menjadi penting dan signifikan, karena Pamong Praja Alumni Perguruan Tinggi Kedinasan Departemen Dalam Negeri perlu menemukenali dinamika terselubung dari sistem yang kompleks, *recognize the hidden dynamics of the complex system, the complexity at the edge of order and chaos, the great disruption, turbulence, paradox, the*

*clash of civilization and the turning point.* Jadi ada nilai-nilai yang sedang merosot dan ada nilai-nilai yang sedang menanjak kemudian berbenturan satu sama lain.

## **Fokus Penelitian**

Masalah penelitian disertasi ini dimulai dari identifikasi masalah semenjak milenium pertama, kedua dan ketiga. Setelah itu diadakan pembatasan masalah mengenai dampak elemen-elemen inovasi kebijakan publik dalam bidang pendidikan tinggi kedinasan Pamong Praja, yaitu kreasi dan invensi perubahan sistem pendidikan, kreasi dan invensi perubahan sistem pengorganisasian, kreasi dan invensi perubahan system pembiayaan terhadap pencapaian target dan realisasi dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pungutan Retribusi Kebersihan serta Zakat Infag dan Shadaqoh.

Selanjutnya fokus masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut :

- Mengapa *public policy* mempengaruhi *performance driven* ?
- Faktor-faktor apa yang menyebabkan/mendorong ?
- Bagaimana keterpautan antar variabelnya ?
- Bagaimana arah pengaruh masing-masing variabel ?

### Hipotesis Penelitian

Sebagai hipotesis dalam penelitian ini, ialah “gerak kinerja (*performance driven*) Pamong Praja dipengaruhi oleh kebijakan publik (*public policy*) dengan dukungan pemberdayaan rakyat (*empowering people*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*).

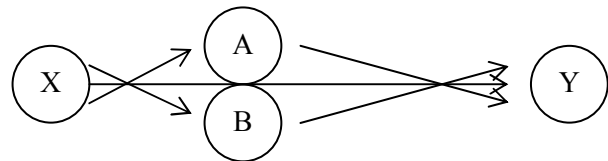
Apabila *performance driven* Pamong Praja dipengaruhi oleh *public policy*, maka semakin besar *performance driven* Pamong Praja berarti semakin besar pengaruh *public policy* dan semakin meningkat lagi dengan adanya dukungan *empowering people* dan *good governance*.

### Metodologi Penelitian

Sumber data yang digunakan adalah “**3 P**”, yaitu *person, place and paper*. Yang dimaksud dengan *Person* dalam penelitian ini adalah 100 orang Pamong Praja (Kades/Lurah, Camat, Walikota, Bupati, Gubernur dan Rektor/Direktur/Guru Besar) sedangkan *Place* adalah lokasi tempat kedudukan IIP di Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta dan STPDN di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Bandung. Sebagai sample area ditetapkan 65

Kelurahan, 10 Kecamatan dan 1 Kota di DKI Jakarta dan 1 Kabupaten, 1 Kecamatan, 12 Desa di Jawa Barat serta masing-masing 5 Pejabat di kampus IIP Jakarta dan STPDN. Kemudian *Paper*, yaitu sumber data sekunder untuk melengkapi data primer.

Teknik pengumpulan data lapangan digunakan kuesioner, yaitu 6 item untuk variabel moderator *good governance*, 9 item untuk variabel moderator *empowering people*, 10 item untuk variabel



independent *public policy*, dan 10 item untuk variabel dependent *performance driven*. Sebelum operasionalisasi terlebih dahulu diadakan uji validitas dengan koefisien korelasi Spearman dan uji reliabilitas dengan alpha Cronbach. Pengolahan data secara manual dan komputer melalui SPSS versi 9.01 for windows 2000 dengan Z score, regresi korelasi ganda atau analisis jalur (*path analysis*).

### HUBUNGAN ANTAR VARIABEL

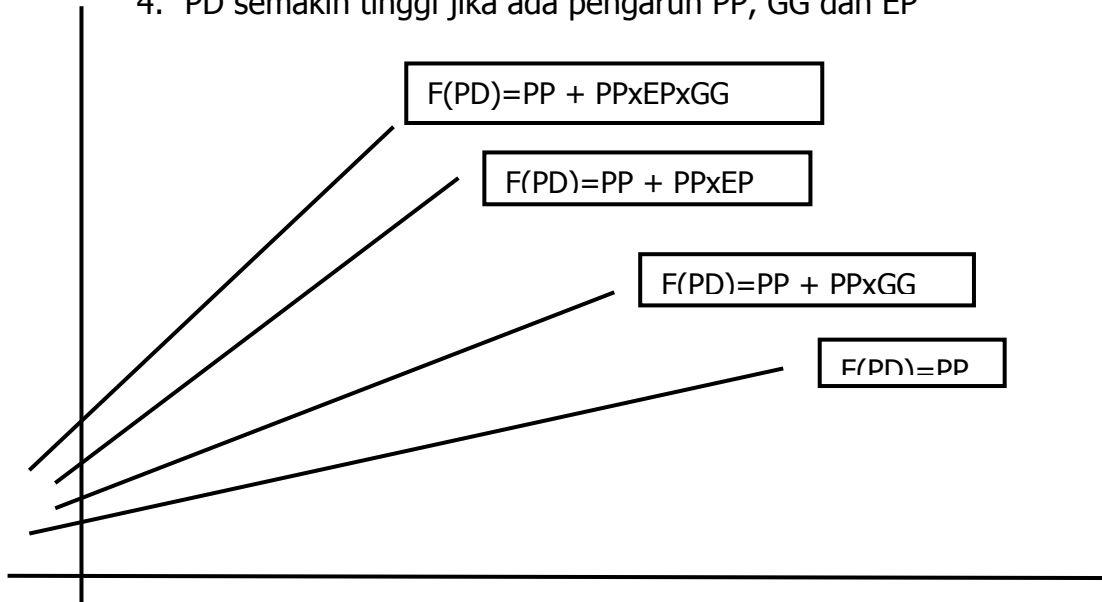
dimana,

- A = *good governance* atau pemerintahan yang baik/amanah
- B = *empowering people* atau pemberdayaan masyarakat/rakyat
- X = *public policy* atau kebijakan publik/pemerintahan
- Y = *performance driven* atau kinerja/unjuk kerja/performansi



## SKENARIO HIPOTESIS

1. PD dipengaruhi oleh PP
2. PD semakin tinggi jika ada pengaruh PP dan GG
3. PD semakin tinggi jika ada pengaruh PP dan EP
4. PD semakin tinggi jika ada pengaruh PP, GG dan EP



## COEFFICIENT REGRESSION FOR PUBLIC POLICY (*Sistem Pendidikan, Sistem Pengorganisasian, Sistem Pembiayaan*)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.278	.064		4.334	.000		
	Sisdik	.548	.015	.754	35.623	.000	.738	1.356
	Sisorg	.176	.014	.276	13.029	.000	.737	1.356
	Sisbiaya	.201	.011	.336	18.500	.000	.999	1.001

### COEFFICIENT REGRESSION FOR GOOD GOVERNANCE (*State/Public, Corporate/Private, Society/Citizen*)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-	.000		.	.		
	State	2.588 E-15	.000	.411	.	.	.855	1.169
	Corporate	.333	.000	.610	.	.	.958	1.044
	Society	.333	.000	.577	.	.	.874	1.144
		.333						

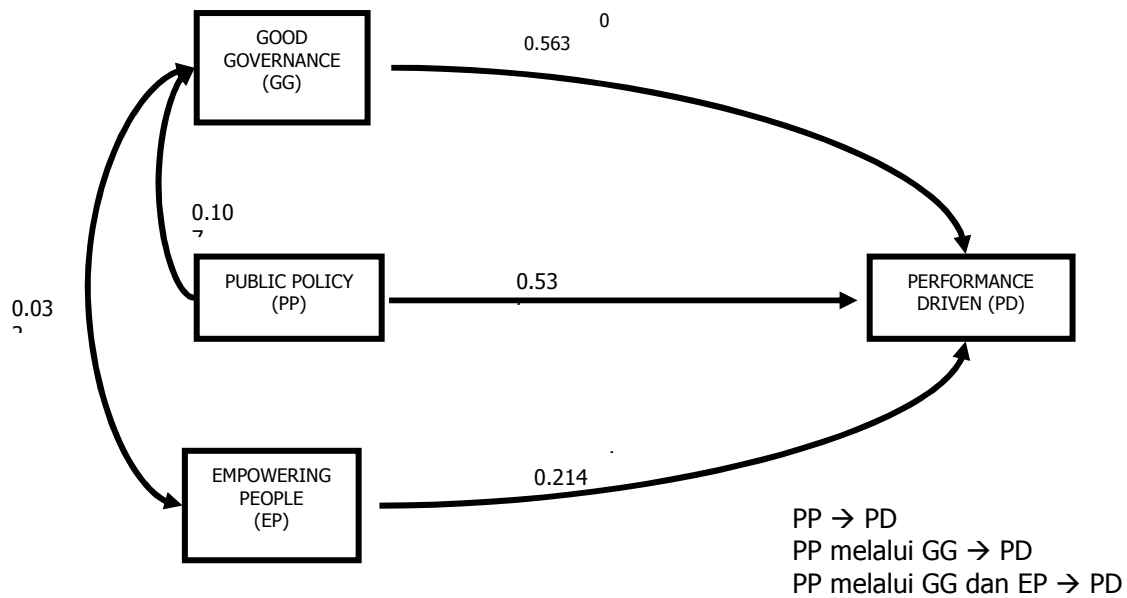
### COEFFICIENT REGRESSION FOR EMPOWERING PEOPLE (*Enabling, Facilitating, Empowering*)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.223E-16	.000		.	.		
	Enabling	.333	.000	.503	.	.	.605	1.242
	Facilitating	.333	.000	.501	.	.	.972	1.029
	Empowering	.333	.000	.424	.	.	.798	1.253

### COEFFICIENT REGRESSION FOR PERFORMANCE DRIVEN (*PAMONG PRAJA ALUMNI, PPA IIP/STPDN*)

Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance			VIF	
1	(Constant)	2.449E-15	.000		.000	1.000		
	STPDN	.200	.000	.340	2.06E+08	.000	.978	1.023
	IIP	.200	.000	.354	2.10E+08	.000	.938	.066
	PPA	.600	.000	.747	4.45E+08	.000	.944	.059

## PATH ANALYSIS



1. Path antara PP dengan PD mempunyai nilai path sebesar 0.536
2. Path antara PP dengan PD melalui GG mempunyai nilai path sebesar 0.563
3. Path antara PP dengan PD melalui EP mempunyai nilai path sebesar -0.214



## Kesimpulan

*Pertama*, ada dampak positif *public policy* atau kebijakan publik terhadap *performance driven* atau gerak kinerja Pamong Praja Alumni Perguruan Tinggi Kedinasan dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Artinya, terdapat hubungan korelasi yang signifikan antara *public policy* dengan *performance driven* Pamong Praja Alumni PTK APDN/IIP/STPDN Depdagri. Dengan kata lain *performance driven* Pamong Praja dipengaruhi oleh *public policy*.

*Kedua*, apabila *performance driven* Pamong Praja dipengaruhi oleh *public policy*, maka semakin meningkat *performance driven* Pamong Praja berarti semakin besar pengaruh *public policy* dan semakin meningkat lagi karena dukungan *good governance* walaupun *performance driven* Pamong Praja belum berkorelasi dengan *empowering people*.

*Ketiga*, *public policy* adalah *systems, sciences and studies* tentang proses perubahan pengetahuan menjadi tindakan melalui formulasi substansi, implementasi dan evaluasi performansi. Jadi apa saja yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam rangka *public policy making system*, maka hasil penelitian ini ternyata masih sejalan dengan dua dalil Dror.

*Keempat*, Analisis kebijakan publik dalam bidang pendidikan adalah orientasi fungsi praktisi yang profesional terhadap korelasi sistem pendidikan, sistem pengorganisasian atau manajemen pendidikan dan sistem pembiayaan pendidikan.

*Kelima*, *good governance* adalah pemerintahan yang baik/ideal/amanah yang mempunyai hubungan korelasi sinergis antara tiga domainnya, yaitu *state/public*, *corporate/private* dan *society/people*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa domain *corporate/private* dan *society/people* lebih kuat korelasinya daripada domain *state/public*. Artinya, jikalau dikehendaki untuk lebih meningkatkan implementasi *good governance*, maka prioritas penguatan terhadap tiga domain tersebut diletakkan mulai dari *corporate/private* dan *society/people* kemudian *state/public*.

*Keenam*, berkaitan dengan domain-domain *good governance* adalah *empowering people*. Sekalipun variabel ini belum mempunyai korelasi yang signifikan terhadap *performance driven* Pamong Praja pada masakini namun pada masadepan *empowering people* bukan hanya dijadikan slogan atau jargon saja, tetapi pemampuan terhadap *enabling, facilitating, protecting* dan *empowering people* sebagai strategi pembangunan *from civic society to civil society* masih harus ditindaklanjuti lagi.

*Ketujuh*, *performance driven* Pamong Praja adalah gerak kinerja atau hasil capai optimal kalau bukan maksimal terhadap perolehan realisasi terhadap target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pungutan Retribusi Kebersihan (PRK), Zakat Infaq dan Shadaqoh (ZIS).

*Kedelapan*, Pamong Praja Alumni (PPA) Perguruan Tinggi Kedinasan dalam Lingkungan Depdagri adalah pemeran utama proses *public policy* atau kebijakan publik di luar pusat. PPA adalah inti masyarakat masyarakat madani dan sebagai perekat bangsa Indonesia kini dan nanti.

## Implikasi

*Pertama*, dalil Dror dalam rangka *public policy making system* ternyata cocok untuk diberlakukan di Indonesia. Dalil pertama Dror menyangkut inovasi kebijakan publik yang masih harus diupayakan terus menerus melalui kreativitas dan inventivitas karena kalau tidak demikian, maka teori Dror tidak akan berubah. "Tatkala masalah kesulitan dan bahaya cenderung meningkat mengikuti deret ukur, orang yang cocok untuk menangani masalah tersebut cenderung meningkat mengikuti deret hitung". Sedangkan dalil kedua Dror adalah mengenai mutu atau kualitas. "Ketika kapasitas masyarakat manusia berkembang cepat, kapabilitas pengambil kebijakan tetap tinggal sama".

*Dua*, sekalipun ada peningkatan inovasi dalam kebijakan pendidikan Pamong Praja untuk meningkatkan kualitas kinerja sehingga menimbulkan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin lama pengalaman lapangan seorang Pamong Praja semakin baik kinerjanya. Namun demikian tak dapat diingkari bahwa dalam praktek masih saja dijumpai adanya kontradiksi, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin lama masa pendidikan semakin rendah nivelering jabatan.



*Tiga*, follow up reformasi Pendidikan Pamong Praja sejalan dengan *learning organization*, *hollow state*, teori administrasi, kekuatan politik dan pembaruan pemerintahan dalam *The New Paradigm For Government*, 10 prinsip dan 5 strategi *reinventing government management (Regom)*, 3 domain *Good Governance* beserta prinsip-prinsip utamanya atau *Beginselen Begoorlijk van Bestuurs* menjadi penting dan signifikan dalam rangka internasionalisasi, institusionalisasi dan profesionalisasi Korps Pamong Praja Indonesia Gaya Baru.

*Empat*, dalam rangka menemukenali dinamika terselubung dari sistem yang kompleks atau *recognize the hidden dynamic of the complex system* yang *chaos, clash, turbulence and paradox*, maka *self evaluation* dan pengukuran kinerja PTK IIP/S/TPDN Depdagri mengemuka untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai dengan kriteria keberhasilan *input, process, output, outcome, benefit and impact*.

## Rekomendasi

*Pertama*, kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah di seluruh wilayah nusantara. Dalam menghadapi era demokratisasi dan perdagangan bebas, maka perlu segera diwujudkan apa yang dinamakan *Good Governance* beserta seluruh domain dan karakteristiknya. Demokratisasi dan *Good Governance* adalah bagaikan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Dengan demikian maka kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah upaya untuk mengatasi patologi birokrasi.

*Kedua*, kepada aparatur pemerintah yang terkait dengan *agenda setting* peninjauan kembali Keppres 119 Tahun 1967 dan Keppres 42 Tahun 1992. *Merger* atau penyatuatapan dua PTK Depdagri, yaitu IIP Jakarta dan S/TPDN Jatinangor menjadi satu Perguruan Tinggi Ilmu Pemerintahan (PTIP) masih harus diagendakan lagi perwujudannya. Dalam rangka pengembangan pendidikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 Perguruan Tinggi Kedinasan IIP dapat juga dimungkinkan menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara). Dengan demikian, Pendidikan Akademik Program Pascasarjana Magister dan Doktor Ilmu Pemerintahan atau Kibernetologi memperoleh justifikasinya. Selain itu para pakar dan ahli pikir akan

dapat mengembangkan *metacontrol knowledge* menjadi Metakontrolologi di samping *public policy sciences/ studies/ analysis*.

*Ketiga*, kepada Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Ikatan Alumni Pendidikan Pamong Praja Indonesia (IKADIK-PPI), Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Pamong Praja masakini menurut versi Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah adalah Gubernur. Dengan demikian maka dalam rangka *empowering people* sebagai proses mengaktualisasikan potensi masyarakat dan untuk mengatasi berbagai kendala bagi perkembangan kreativitas dan inventivitas sebagai indikator kebijakan publik guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan daya saing perekonomian serta ketahanan nasional, maka upaya pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, peningkatan partisipasi dan kemitraan, selain (1) memerlukan keterbukaan birokrasi pemerintah, juga (2) memerlukan langkah-langkah yang tegas dalam mengurangi peraturan dan prosedur yang menghambat, serta (3) memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berperan serta dalam proses formulasi substansi kebijakan, implementasi dan evaluasi performansi pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pembangunan. Oleh karena itu berhubung dengan belum adanya korelasi yang signifikan antara *public policy, empowering people* dengan *performance driven* Pamong Praja, maka peranan MIPI, IKADIK-PPI dan terutama APPSI menjadi sangat penting untuk mengembangkannya.

## Daftar Pustaka

- Giroth, L. M. (2005). Edukasi dan Profesi Pamong Praja: Public Policy Studies, Good Governance and Performance Driven Pamong Praja. Bandung: Penerbit CV Indra Prahasta.
- Giroth, L. M. & Giroth, J. F. R. (2005). Reformasi dan Performansi Pamong Praja: Inkuiri Pembaruan Pemerintahan Unjuk Kerja Pamong Praja dan Implementasi Good Urban Governance. Bandung: Penerbit CV Indra Prahasta.
- Giroth, L. M. (2005). Status dan Peran Pendidikan Pamong Praja Indonesia: Higher Education Pamong Praja, Global Governance and Open Society. Bandung: Penerbit CV Indra Prahasta.

## Penulis :

*Dr. Lexie M. Giroth, S.IP, M.Si* adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor Bandung

